

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap tempat dimana dilakukan suatu kegiatan atau aktivitas baik di rumah, di jalan maupun di tempat kerja, hampir semuanya terdapat potensi bahaya. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dan dilakukan upaya pencegahan maka akan dapat menyebabkan kesakitan, cedera, dan bahkan kecelakaan yang parah. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun potensi yang dapat menimbulkan kerugian berupa penurunan daya dengar, gangguan kesehatan seperti luka atau cidera, cacat atau kematian, kerugian harta benda serta kerusakan peralatan atau mesin dan lingkungan secara luas (Tarwaka, 2012).

Menurut Asfahl (2010) bahwa semua orang pada dasarnya menginginkan tempat kerja yang aman dan sehat, tetapi untuk mencapai hal tersebut membutuhkan manajemen perusahaan yang memadai. Setidaknya manajemen dari masing-masing perusahaan membuat batas standar tertentu dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa manajer perusahaan tidak komitmen dalam menerapkan substansi keselamatan kerja pegawai, sebab seringkali untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi membutuhkan biaya yang tinggi pula, sehingga dengan tidak adanya komitmen inilah seringkali hasilnya relatif rendah terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja pada awalnya muncul untuk melindungi para pekerja dari bahaya yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi atau peralatan mesin yang digunakan, hingga saat ini pun halnya tetap demikian. Kemudian berdasarkan kebutuhan mendasar yang harus diberikan adalah pekerja dan pemilik perusahaan sebagai pengambil peran dalam proses produksi setiap pekerjaan (Ridley, 2008). Indonesia saat ini sedang berusaha menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di setiap lingkungan kerja maupun perusahaan, hal ini sebagai bentuk mandatori atau amanah dari pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pedoman SMK3 oleh pemerintah ini diharapkan mampu terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Tarwaka, 2014).

Namun demikian, tercantum dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa ruang lingkup keselamatan kerja diantaranya meliputi segala bentuk pekerjaan yang dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, dilakukan pengangkutan barang, dilakukan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah, kemungkinan bahaya terkena pelantingan benda, debu, api, cuaca atau radiasi serta suara atau getaran. Secara jelas dan tegas bahwa keselamatan kerja harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan usahanya (Tarwaka, 2012).

Maka hal ini menggambarkan dimana terdapat lingkungan kerja, baik perusahaan yang sudah mempunyai manajemen perusahaan yang diharapkan terintegrasi dengan SMK3, maupun perusahaan yang belum menerapkan yaitu kegiatan pekerjaan berskala kecil (*home industry*) juga menganut kepada substansi aturan di atas. Sebagaimana faktor bising termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang berada dalam ruang lingkup keselamatan kerja. Unsur ini sangat penting agar seseorang dapat menikmati hidup yang berkualitas, baik di rumah maupun di tempat kerja. Hal ini seringkali digambarkan dalam beberapa situasi dan kondisi pekerjaan, baik tata letak tempat kerja maupun material-material yang digunakan menghadirkan risiko yang tinggi (Ridley, 2008).

Menurut Roestam dalam Anggoro (2011), salah satu masalah utama pada kesehatan kerja di berbagai negara ialah kebisingan di lingkungan kerja. Menurut *World Health Organization* (WHO) (1995), diperkirakan hampir 14% dari total tenaga kerja negara industri terpapar bising melebihi 90 dBA di tempat kerjanya. Diperkirakan lebih dari 20 juta orang di Amerika terpapar bising 85 dBA atau lebih. Waugh dan Forcier mendapat data bahwa perusahaan kecil sekitar Sydney mempunyai tingkat kebisingan 87 dB. Di Quebec-Canada, Frechet mendapatkan data bahwa 55% daerah industrinya mempunyai tingkat kebisingan di atas 85 dB dan menurut survei prevalensi *Noise Induced Hearing Loss* (NIHL) atau Tuli Akibat Bising (TAB) bervariasi antara 40–50% (Roestam, 2004).

Penelitian di Indonesia mengenai gangguan pendengaran akibat bising juga telah dilakukan. Sulistyanto, dkk (2009) mengenai faktor yang menyebabkan tuli akibat bising atau NIHL pada Masinis Daop IV Semarang menyimpulkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara umur dengan tuli akibat bising di tempat kerja dengan risiko kelompok umur tua empat kali lipat lebih tinggi dari kelompok umur muda. Sundari (1997) pada penelitiannya di pabrik peleburan besi baja di Jakarta, mendapatkan 31,55 % pekerja menderita tuli akibat bising, dengan intensitas bising antara 85 – 105 dBA, dengan masa kerja rata-rata 8,99 tahun (Roestam, 2004).

Sentra Industri Pande Besi yang terletak di Desa Padas Karangnom Kabupaten Klaten merupakan industri yang bergerak dalam bidang pembuatan olahan besi atau penyedia alat-alat di sektor pertanian. *Home Industry* ini telah mampu menyerap tenaga kerja >100 orang dengan umur berkisar antara 20-55 tahun. Kegiatan kerja yang ada yaitu melakukan berbagai aktifitas seperti pemotongan besi, pengelasan atau penyambungan, dan kegiatan memalu serta *finishing* dengan waktu kerja 8 jam per hari dan 1 jam istirahat, hal ini guna menghasilkan produk berbahan dasar besi yang tentu saja menghasilkan suara atau bising. Hasil studi pendahuluan dilakukan dengan pengukuran intensitas kebisingan didapatkan rata-rata tingkat kebisingannya adalah 110,17 dBA, atau berdasarkan Permenakertrans RI No.13 tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja bahwa nilai ini melebihi NAB kebisingan yang diperbolehkan yaitu 85 dBA untuk waktu kerja 8 jam/hari.

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi bahaya yang berkaitan dengan kebisingan dan dapat mengakibatkan penurunan daya dengar bahkan ketulian. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dan membuktikan apakah ada hubungan antara umur dan lama paparan dengan penurunan daya dengar pada pekerja terpapar kebisingan impulsif berulang di Sentra Industri Pande Besi Desa Padas Karangnom Kabupaten Klaten.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara umur dan lama paparan dengan penurunan daya dengar pada pekerja terpapar kebisingan impulsif berulang di Sentra Industri Pande Besi Desa Padas Karangnom Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui adanya hubungan antara umur dan lama paparan dengan penurunan daya dengar pada pekerja terpapar kebisingan impulsif berulang di Sentra Industri Pande Besi Desa Padas Kabupaten Klaten.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui intensitas kebisingan impulsif berulang di pande besi.
- b. Mengetahui tingkat penurunan daya dengar pekerja pande besi.
- c. Menganalisis hubungan umur dengan penurunan daya dengar.
- d. Menganalisis hubungan lama paparan dengan penurunan daya dengar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

##### **1. Pekerja**

Untuk diketahui bahwa pekerjaan yang sedang dijalani berpotensi mengakibatkan gangguan pendengaran atau penurunan daya dengar, sehingga pekerja dapat mengantisipasi dan melakukan upaya pencegahan.

##### **2. Pemilik Industri**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan saran bagi pemilik agar diketahui adanya hubungan antara umur dan lama paparan dengan penurunan daya dengar.

##### **3. Peneliti lain**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.